**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah negara Rusia memiliki doktrin militer yaitu dokumen paling signifikan dari politik militernya. Dokumen tersebut tentu saja tidak mengungkapkan rahasia militer atau informasi rahasia lainnya. Dikarenakan itu menggambarkan penilaian dan analisis yang paling diterima secara formal dari pemerintah tentang lingkungan keamanannya. Dikarenakan untuk menilai interpretasi pemerintah Rusia tentang premis dasar ancaman dan bahaya, karakteristik konflik dan cara utama untuk melawannya, teks semacam itu adalah bahan penelitian yang cocok. Doktrin militer mengacu pada komponen penting dari kebijakan keamanan nasional atau strategi besar, yang dijelaskan doktrin militer secara umum sebagai “memfokuskan kemampuan militer untuk menentukan tujuan strategis dan hasil akhir yang diinginkan, merinci tindakan militer yang diperlukan, mengalokasikan sumber daya, dan menahan alokasi seperti dipimpin oleh para pemimpin politik (Jouni Virtaharju and Jari Rantapelkonen 2020).

Doktrin militer adalah teori negara tentang bagaimana ia dapat memberikan keamanan terbaik untuk dirinya sendiri. Sebuah doktrin militer mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan negara dan merancang solusi politik, ekonomi, militer, dan lainnya untuk ancaman tersebut. Idealnya, sebuah doktrin juga akan memperkenalkan *“meansends chain of logic”*, penjelasan mengapa teori tersebut diharapkan berhasil, menganggap doktrin militer sebagai subkomponen dari strategi yang lebih besar, berurusan secara eksplisit dengan sarana militer, sarana apa yang harus digunakan, dan bagaimana mereka akan dipekerjakan. Oleh karena itu, sebuah doktrin harus menjelaskan prioritas dan spesifikasi tentang bagaimana kekuatan militer harus disusun dan digunakan untuk menanggapi ancaman dan peluang yang diakui. Sebuah doktrin militer mencerminkan penilaian para profesional militer bangsa dan pada tingkat yang berbeda-beda juga dari para pemimpin politik, tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin dan perlu secara militer (Cimbala and J. 2013).

Doktrin militer datang dalam tiga kategori ofensif, defensif, dan pencegah. Doktrin ofensif bertujuan untuk melucuti senjata musuh untuk menghancurkan angkatan bersenjatanya, doktrin defensif bertujuan untuk menyangkal musuh dengan tujuan yang dia cari dan doktrin pencegah bertujuan untuk menghukum agresor untuk menaikkan biayanya tanpa mengacu pada pengurangan biaya sendiri. Doktrin militer juga datang dengan tiga penekannan yang berbeda yaitu, menjamin keamanan dengan mengorbankan negara lain dan mengurangi keamanan secara keseluruhan, lalu menjamin keamanan nasional dengan menyamakan ancaman dan menstabilkan keseluruhan keamanan, serta menjamin keamanan nasional dengan meningkatkan rasa aman negara lain, sehingga melemahkan sumber ancaman. Doktrin militer juga bervariasi dalam hal integrasinya dengan tujuan politik. Selain itu, beberapa doktrin bagaimana inovasi, dan beberapa stagnasi. Kita harus mengakui bahwa doktrin menggambarkan sikap normatif: bagaimana kekuatan militer harus diterapkan.

Sebuah doktrin juga merupakan penyederhanaan dan kompromi dari berbagai kompleksitas yang terkait dengan memimpin dan mengelola kekuatan besar di lingkungan yang mudah berubah. Namun, doktrin bertujuan untuk memberikan kerangka konsep, prinsip, dan prinsip yang koheren dan konsisten yang dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi, dan dimaksudkan untuk membantu dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana operasional (Virtaharju and Rantapelkonen 2015).

Doktrin militer Rusia lebih abstrak dan memiliki lebih banyak politik di dalamnya dibandingkan dengan doktrin negara-negara Barat, yang biasanya berkonsentrasi pada pedoman aksi militer. Akibatnya, doktrin Rusia terkait erat dengan tataran politik-strategis. Fakta bahwa suatu negara meletakkan pengamanan kelanjutannya dalam kebijakan keamanan nasional adalah prinsip yang diterima secara luas. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, kesejahteraan, dan stabilitas dengan mengambil langkah-langkah politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Setiap negara pasti memiliki kepentingan tertentu. Doktrin militer Rusia telah mengalami amandemen dan pembaharuan sekitar empat kali terhitung dari tahun 1993 hingga 2014, macam macam latar belakang yang menjadikan doktrin militer ini selalu terjadi amandemen dan pembaharuan setiap memliki kasus tertentu (Nikolai Sokov 2011).

Hubungan historis antara Ukraina dan Rusia sangat kontroversial dan juga kekeluargaan. Rusia berutang bagian signifikan dari warisan budaya, agama, dan politiknya ke kota-kota dan wilayah di Ukraina. Kedua negara berbagi asal usul politik dengan Rus Kiev, dan konversi sebagian besar dunia Slavia ke Kristen Ortodoks dimulai di Krimea. Setelah waktu itu, wilayah yang kemudian menjadi Ukraina terus-menerus diperebutkan dan dibagi di antara kekuatan kekaisaran yang bersaing sampai wilayah barat Ukraina yang dipegang oleh Polandia diambil oleh Bolshevik. Selama Perang Dunia I, kaum Bolshevik, dengan dukungan Tentara Merah dan setelah kemenangan berulang kali melawan pemerintah nasionalis Ukraina di Kyiv, mengambil alih wilayah yang menjadi Republik Sosialis Soviet Ukraina (UkSSR) (Cosgrove 2020).

Konflik Ukraina bisa dibilang menjadi salah satu contoh bahwa *“near aboard”* atau negara negara perpecahan Uni Soviet ini yang menjadikan kepentingan utama politik luar negeri Rusia. Pada awal 2014, Federasi Rusia menanggapi gerakan *Euromaidan* yang berpuncak di Ukraina dengan menginvasi, menduduki, dan mengambil Krimea. Bertindak tanpa tanda dan disertai dengan penolakan resmi dari Kremlin, pasukan Rusia mengisolasi dan menduduki situs politik dan militer Ukraina di semenanjung. Tindakan Rusia memicu krisis yang jauh lebih besar daripada di Ukraina, dengan para pemimpin Amerika Serikat mempertimbangkan tanggapan militer, termasuk meningkatkan latihan militer, mengerahkan peralatan dan personel militer tambahan, dan meningkatkan kehadiran angkatan laut, udara, dan darat, semua di tengah agresi yang agresif. Postur nuklir dari Moskow melihat Ukraina sebagai panggung untuk konfrontasinya dengan Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Selain invasi, pesan nuklir canggih, dan ancaman yang dimaksudkan untuk mencegah intervensi apa pun atas nama Ukraina.

Selama tahun 2014, pemberontak separatis pro-Rusia mulai merebut wilayah di Ukraina timur. Pertempuran antara pemberontak dan militer Ukraina meningkat, pemberontak mulai kalah, dan, Ketegangan tersebut menimbulkan beberapa pergerakan aktivitas dari kelompok-kelompok pro rusia dengan tentara Rusia secara terang-terangan menginvasi Ukraina timur untuk mendukung pemberontak. Ini semua telah membawa hubungan antara Rusia dan Barat ke titik terendah sejak Perang Dingin (Fisher 2014).

Beberapa hari setelah presiden Ukraina pro-Moskow digulingkan dari kekuasaan, gerombolan aneh bersenjata mulai merebut gedung-gedung pemerintah di Krimea. Beberapa warga Krimea mengadakan rapat umum untuk menunjukkan dukungan bagi presiden yang digulingkan dan, dalam beberapa kasus, menyerukan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung kembali dengan Rusia. Kelompok-kelompok pria bersenjata berkembang sampai menjadi jelas bahwa mereka adalah pasukan militer Rusia, yang dengan paksa tetapi tanpa pertumpahan darah membawa seluruh semenanjung di bawah pendudukan militer. Setelah itu, warga Krimea memilih wilayah mereka untuk menjadi bagian dari Rusia. Sebagian besar dunia melihat pemungutan suara pemisahan Krimea sebagai tidak sah karena beberapa alasan: itu diadakan di bawah pendudukan militer Rusia yang bermusuhan tanpa pemantauan internasional dan banyak laporan intimidasi, lalu didorong melalui hanya beberapa minggu peringatan, dan ilegal di bawah hukum Ukraina. Namun, sah atau tidak, Krimea secara efektif telah menjadi bagian dari Rusia. AS dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi ekonomi pada Rusia untuk menghukum Moskow karena ini, tetapi tidak ada tanda bahwa Krimea akan kembali ke Ukraina (Fisher 2014).

Ukraina pada saat itu terlibat dalam pertarungan tegang dengan Rusia untuk mempertahankan integritas teritorial dan kemerdekaan politiknya. Terletak di antara Eropa Tengah, Rusia, dan Timur Tengah, Ukraina dibentuk oleh kekaisaran yang menggunakannya sebagai pintu gerbang strategis antara Timur dan Barat dari kekaisaran Romawi dan Ottoman hingga Reich Ketiga dan Uni Soviet. Selama berabad-abad, Ukraina telah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya. Percampuran antara penduduk menetap dan nomaden dan Kristen dan Islam di perbatasan stepa menghasilkan kelas pejuang ganas yang dikenal sebagai Cossack, misalnya, sementara pertemuan antara gereja Katolik dan Ortodoks menciptakan tradisi keagamaan yang menjembatani Kristen Barat dan Timur.

Ukraina juga telah menjadi rumah bagi jutaan orang Yahudi, yang berfungsi sebagai tempat kelahiran Hassidisme dan sebagai salah satu ladang pembunuhan Holocaust. Plokhy menelaah sejarah pencarian identitas Ukraina melalui kehidupan tokoh-tokoh utama dalam sejarah Ukraina: Pangeran *Yaroslav* *the Wise of Kyiv*, yang putrinya Anna menjadi ratu Prancis; penguasa Cossack Ivan Mazepa, yang diabadikan dalam puisi Byron dan Pushkin; Nikita Khrushchev dan anak didiknya yang berubah menjadi musuh bebuyutannya Leonid Brezhnev, yang menyebut Ukraina sebagai rumah mereka; dan para pahlawan protes Maidan tahun 2013 dan 2014, yang mewujudkan perjuangan saat ini atas masa depan Ukraina. Seperti yang dijelaskan Plokhy, krisis hari ini adalah kasus tragis dari sejarah yang berulang, karena Ukraina sekali lagi berada di pusat pertempuran proporsi global. Sejarah otoritatif negara vital ini, Gerbang Eropa memberikan wawasan unik tentang asal-usul krisis internasional paling berbahaya sejak akhir Perang Dingin (Cosgrove 2020).

Hubungan diplomatik yang buruk terus berlanjut antara Ukraina dan Rusia, sebagian didorong oleh klaim awal Ukraina atas Armada Laut Hitam, memperburuk tekanan politik domestik pada Boris Yeltsin terhadap konsesi. Setelah menyerahkan senjata nuklir taktisnya untuk dibongkar di Rusia, Ukraina merasa tidak mendapat bagian yang adil dari kompensasi finansial signifikan yang diterima Rusia dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas uranium tingkat senjata yang diekstraksi dari senjata. Ekspresi politisi Rusia tentang klaim teritorial atas beberapa bagian Ukraina juga memperburuk ketegangan diplomatik dan negosiasi yang berkepanjangan untuk persenjataan strategis Ukraina.

Pada KTT NATO di Bukares, Putin memperingatkan bahwa jika Ukraina bergabung dengan aliansi, itu akan berisiko kehilangan Krimea dan Ukraina timur. Belakangan tahun itu, pada Agustus 2008, Rusia menginvasi Georgia, calon anggota NATO lainnya dari bekas blok Soviet. Rusia berhasil mengamankan wilayah separatis Georgia, menciptakan konflik beku dan secara efektif membatasi prospek keanggotaan NATO. Khususnya, Armada Laut Hitam yang berbasis di Sevastopol, Krimea, berpartisipasi dalam konflik tersebut, menunjukkan kekritisannya terhadap upaya Rusia untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah tersebut (Nikolai Sokov 2011).

Kebijakan luar negeri Rusia dalam konflik di Ukraina dapat dikatakan sebagai Rusia untuk kembali menunjukan pengaruh besarnya dalam system Internasional khususnya negara negara yang menjadi perpecahan Uni Soviet sebagai pengaplikasian suatu konsep yang di sebut dengan konsep Russian World yang saat ini menjadi sebuah ideologi bagi kebijakan luar negeri Rusia. Kebijakan tersebut muncul sebagai kritikan konservatif Rusia pada era globalisasi dan pembuatan Rezim yang di pimpin oleh Amerika Serikat (Bandow 2017).

Pengaruh kebijakan Rusia di Ukraina amat terasa di berbagai pihak yang memicu pendorongan pihak-pihak tersebut untuk terlibat dalam konflik di Ukraina, ada beberapa faktor yang memicu yaitu faktor internal maupun eksternal. Dalam faktor eksternal adalah kondisi di luar wilayah Teritorial Rusia seperti kondidi internal Ukraina, relasi Rusia-Ukraina, dan kondisi politik Kawasan antara Rusia dengan poros kekuatan seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, NATO, dan tidak luput dari negara – negara perpecahan Uni Soviet lainnya secara meluas. Apabila secara Internal, yaitu kebijakan tersebut memiliki dampak bagi kondisi domestik Rusia itu sendiri apalagi kebijakan tersebut di lakukan oleh Rusia, dan pihak pihak seperti Uni Eropa, Amerika dan beberapa negara sekutu yang mendatangkan sanksi ekonomi terbatas pada Rusia, saksi tersebut menjadi dampak dari perekonomian Rusia. Tidak luput dengan dampak kebijakan pada kondisi domestik politik Rusia, karena aneka saksi tersebut melibatkan beberapa proses seperti integrasi wilayah crimea dan juga berkaitan dengan berbagai opini dari masyarakat Internasional (Norwich University Online 2017).

Doktrin Militer berurusan secara eksklusif dengan dimensi militer-diplomatis internasional dari kepentingan nasional. Rupanya, militer tidak ingin ikut campur atau mengabaikan kepentingan keamanan sosial ekonomi negara. Jelaslah, kepemimpinan militer Rusia pastilah memiliki pemahaman yang baik tentang konsep “keamanan yang luas”, yang saat ini menjadi model yang diterima dalam poltik (keamanan) internasional. Karena tingkat atas Staf Umum diangkat dengan latar belakang ideologis Perang Dingin, sangat mungkin bahwa para jenderal dengan keras kepala berpegang pada pandangan yang ketinggalan zaman dan terbatas tentang dimensi keamanan militer-diplomatis. Doktrin tersebut melihat pemenuhan tujuan politik-strategis serta keamanan internal dan eksternal Rusia terancam oleh sejumlah penyebab yang terkait dengan faktor-faktor destabilisasi. Bagian dari doktrin ini menggambarkan sudut pandang tentang pencegahan militer, keamanan, dan penggunaan kekuatan, serta pengerahan kekuatan dan pasukan di luar negeri, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan dari strategi besar Rusia. Pernyataan tentang perubahan doktrinal difokuskan terutama pada (kemampuan) memastikan keamanan. Hanya di sela-sela kepentingan yang disebutkan, seperti menjamin kedaulatan negara, melindungi sumber daya dan infrastruktur energi, serta menjaga keseimbangan kekuatan di dekat perbatasan Rusia (Sofyan, 2018).

Militer Rusia mengamati bahwa kerjasama keamanan dengan Barat tidak mengurangi jumlah ancaman militer. Seperti dokumen sebelumnya, Doktrin baru berhak untuk menggunakan senjata nuklir tidak hanya dalam menanggapi serangan nuklir atau serangan dengan senjata pemusnah massal lainnya (sebuah sedikit revisi dari jaminan negatif yang telah menjadi umum di antara negara-negara pemilik senjata nuklir sejak tahun 2000), tetapi juga dalam menanggapi serangan konvensional. Dengan kata lain, itu membuat papan penggunaan pertama. Misi utama yang ditugaskan untuk senjata nuklir oleh Doktrin baru adalah “pencegahan konflik militer nuklir atau konflik militer lainnya.” Misi ini mengasumsikan “pemeliharaan stabilitas strategis dan kemampuan pencegahan nuklir pada tingkat kecukupan.” Di bagian lain dari dokumen tersebut, pengertian "kecukupan" didefinisikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan kerusakan "yang telah ditentukan sebelumnya" kepada agresor dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa Doktrin Militer, seperti doktrin lainnya, berkembang. Situasi berubah, negara berubah, sistem keamanan internasional berubah, dan Doktrin Militer Nasional juga berubah. Analisis Doktrin Militer Federasi Rusia dari tahun 2014 memperjelas bahwa dokumen tersebut bersifat defensif (Cosgrove 2020).

Disisi lain Rusia mengusahakan untuk meluaskan *“sphere of influence”* kepada negara – negara *“near abroad”* yang kemumgkinan berkaitan dengan ketidakstabilan keamanann yang masih terjadi pada Ukraina sejak *“Orange Revolution”* sampai konflik Krimea dan Ukraina Timur. Maka di penelitian ini, akan mencoba meneliti bagaimana penerapan dari doktrin militer Rusia pada tahun 2015 hingga final di tahun 2020. Terlebih akan berfokus dalam bagaimana dampak yang di timbulkan oleh penerapan kebijakan doktrin militer Rusia dalam mempengaruhi konflik dan keamanan negara Ukraina selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka, penulis mencoba menguraikan kemungkinan masalah yang akan timbul dari judul penelitian yang kemudia penulis jabarkan dalam identifikasi masalah, yakni:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan Doktrin Militer Rusia dalam jangka tahun 2015 hingga 2020?
2. Bagaimana penerapan kebijakan Doktrin Militer Rusia pada tahun 2015 hingga 2020?
3. Bagaimana Dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas keamanan di Ukraina?
   1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah agar penelitian ini menjadi terfokus. Dalam penelitian ini fokusnya adalah untuk menjelaskan doktrin militer Rusia pada tahun 2015 hingga 2020, serta kebijakan yang dilakukan setelah penandatanganan doktrin militer tahun 2014 yang di batasi dengan adanya dampak langsung maupun secara tidak langsung kepada stabilitas keamanan di Ukraina serta bagaimana respon negara Ukraina kepada doktrin tersebut. Peneliti akan membatasi waktu penelitian dari dimulainya pemberitahuan adanya amandemen doktrin militer Rusia pada tahun 2014 serta penerapan doktrin militer tersebut dalam jangka waktu dari 2015 hingga 2020.

* 1. **Rumusan Masalah**

Dalam membatasi ruang lingkup masalah yang ada serta berdasarkan identifikassi masalah maka dipilihlah rumusan masalah, yaitu:

**“Bagaimana penerapan, respon serta dampak yang di sebabkan oleh Doktrin Militer Rusia pada kestabilan keamanan di Ukraina”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Doktrin Militer Rusia dalam jangka tahun 2015 hingga 2020?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan Doktrin Militer Rusia pada tahun 2015 hingga 2020?
3. Untuk mengetahui bagaimana Dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas keamanan di Ukraina?
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang di dapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sarjana strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
2. Secara umum penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa yang mengambil Studi Hubungan Internasional untuk dijadikan referensi penelitian di masa yang akan datang.
3. Sebagai sarana yang untuk mengukur kemampuan serta pemahamam penulis dalam menganalisis suatu isu dalam Hubungan Internasional.